



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41/KPTS/Dt/2026
TENTANG
FORMAT/TEMPLAT ADMINISTRASI HUKUM VERIFIKASI USULAN CALON
PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 40/KPTS/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Usulan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Format/Templat Administrasi Hukum Verifikasi Usulan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 523);
2. Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 40/KPTS/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Usulan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO TENTANG FORMAT/TEMPLAT ADMINISTRASI HUKUM VERIFIKASI USULAN CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH.**

KESATU : Format/templat administrasi hukum pengusulan calon penerima bantuan Bedah Rumah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai format/templat Keputusan Direktur Jenderal tentang Tim Verifikasi Usulan, Berita Acara Hasil Verifikasi Usulan, dan Daftar Hasil Verifikasi Usulan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 20/KPTS/Dt/2026 tentang Format/Templat Administrasi Hukum Pengusulan, Verifikasi, dan Penggantian Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2026

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA
DAN PENGENDALIAN RISIKO,



ROBERIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA
DAN PENGENDALIAN RISIKO KEMENTERIAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41/KPTS/Dt/2026
TENTANG
FORMAT/TEMPLAT ADMINISTRASI HUKUM
VERIFIKASI USULAN CALON PENERIMA
BANTUAN BEDAH RUMAH

DAFTAR FORMAT/TEMPLAT BAKU

- A. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG TIM VERIFIKASI USULAN
- B. SURAT TUGAS PELAKSANAAN VERIFIKASI USULAN
- C. NASKAH HASIL VERIFIKASI USULAN

A. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG TIM VERIFIKASI USULAN

-kop surat unit organisasi-

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
... KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ...
TENTANG

TIM VERIFIKASI USULAN CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH TAHUN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan verifikasi usulan calon penerima bantuan Bedah Rumah Tahun ... , perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal ... tentang Tim Verifikasi Usulan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah Tahun ...;

Mengingat : Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor ... Tahun ... tentang Bedah Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ... TENTANG TIM VERIFIKASI USULAN CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH TAHUN ...

KESATU : Tim Verifikasi Usulan Calon Penerima Bantuan Bedah Rumah pada Direktorat Jenderal ... dibentuk dengan susunan keanggotaan tim sebagai berikut:

- | | | |
|-------------|---|--|
| Ketua | : | ... nama jabatan ex officio; |
| Wakil Ketua | : | ... nama jabatan ex officio; |
| Sekretaris | : | ... nama jabatan ex officio; |
| anggota | : | 1. ... nama jabatan ex officio; |
| | | 2. ... nama jabatan ex officio; |
| | | 3. ... nama tanpa gelar tanpa jabatan; |
| | | 4. ... nama tanpa gelar tanpa jabatan, |

untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian pengusulan calon penerima bantuan Bedah Rumah berdasarkan data yang diunggah dan yang terdapat dalam sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL ...,

NAMA TANPA GELAR

B. SURAT TUGAS PELAKSANAAN VERIFIKASI USULAN

-kop surat unit kerja-

SURAT TUGAS
NOMOR ...

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan verifikasi usulan calon penerima bantuan Bedah Rumah secara efektif, efisien, tepat sasaran, terbuka, transparan, dan akuntabel di wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman ..., perlu menetapkan Surat Tugas ini;

Dasar : Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor ... Tahun ... tentang Bedah Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMBERI TUGAS

Kepada : 1. ...
2. ...
3. dan seterusnya.

Untuk : 1. segera melaksanakan verifikasi usulan calon penerima bantuan Bedah Rumah melalui sistem elektronik berbasis digital ...;
2. segera memeriksa kesesuaian dokumen pengusulan ...;
3. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan.

..., ... 20....

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
.../Kepala Satuan Kerja ...,

tanda tangan dan cap dinas

Nama Tanpa Gelar

C. NASKAH HASIL VERIFIKASI USULAN

NASKAH HASIL VERIFIKASI USULAN CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH TAHUN ... KABUPATEN/KOTA ... PROVINSI ...
NOMOR ...

A. DATA REKAP

Verifikasi usulan telah dilaksanakan berdasarkan usulan calon penerima bantuan yang terdapat di sistem elektronik berbasis digital ... tanggal ... bulan ... tahun ... dengan hasil sebagai berikut:

jumlah total alokasi : ... unit
jumlah total usulan : ... orang
hasil yang memenuhi kriteria/persyaratan : ... orang
hasil yang tidak memenuhi kriteria/persyaratan : ... orang
alasan/keterangan ringkas tidak memenuhi : ...

B. DAFTAR HASIL VERIFIKASI USULAN CALON PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH TAHUN ...

NO	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	NO KTP	NO KK	NO KTP PASANGAN	ALAMAT RT/LH	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	PENGUSUL	PERNAH MENERIMA BANTUAN
1	2	3*	4*	5*	6	7*	8	9	10	11	12	13*
1.												
2.												
dst												

Keterangan:

3* = Jenis Kelamin Laki-laki/Perempuan, 4* = Nomor Kartu Tanda Penduduk, 5* = Nomor Kartu Keluarga, 7* = Alamat Rumah Tidak Layak Huni, tidak harus sama dengan alamat di KTP/KK, jika tidak sama maka cukup dibuat surat pernyataan dari CPB yang bersangkutan dengan diketahui minimal oleh perangkat desa/pegawai kelurahan/pegawai nama lain setingkat desa/kelurahan, 13* = *) BSFS/FLPP/BP2BT/ Bedah Rumah dari pemerintah (BSFS = Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; FLPP = Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan; BP2BT = Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan)

Naskah Hasil Verifikasi Usulan ini termasuk untuk Naskah Hasil Verifikasi Usulan Ulang/Pengganti

..., ... 20...
Pelaksana Verifikasi Usulan ...,
tanda tangan
nama tanpa gelar

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA
DAN PENGENDALIAN RISIKO,



ROBERIA